

## Membangun Karakter Mandiri pada Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Strategi Scrum di Negara Totochan

**Andhy Surya Hapsara**

SMA Negeri 7 Yogyakarta

Email: ansasos@yahoo.com

**Abstrak:** Kemandirian merupakan karakter utama yang perlu ditumbuhkan pada anak berkebutuhan khusus (ABK), yang dapat dibentuk melalui pendidikan inklusi di sekolah reguler maupun pendidikan khusus di SLB. Jepang merupakan salah satu negara yang mewajibkan sistem inklusi di seluruh sekolah pada semua jenjang pendidikan. Pemberdayaan ABK di Jepang dilakukan secara komprehensif melalui pembentukan tim scrum yang terdiri tim medis (dokter), pemerintah, sekolah (guru), perguruan tinggi (dosen), dan orang tua. Tim scrum bekerja sama secara kontinu untuk mendampingi dan memberikan rekomendasi di setiap jenjang pendidikan hingga pemilihan lapangan kerja yang tepat bagi ABK. Karakter mandiri pada ABK merupakan kunci bagi mereka untuk berlepas diri sebagai beban keluarga dan masyarakat. Dukungan pemerintah, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk membentuk kemandirian ABK. Sistem pendidikan inklusi di Jepang merupakan salah satu model ideal yang dapat diadaptasikan di Indonesia dengan segala tantangannya, baik dari segi teoritis maupun praktis.

**Kata kunci:** anak berkebutuhan khusus, kemandirian, scrum, pendidikan inklusif.

### *Building Independent Character of Children with Special Needs Through the Scrum Strategy in the Homeland of Totochan*

**Abstract:** *Independence is the main character that needs to be grown in children with special needs, which can be formed through inclusive education in regular schools and special education in special schools. Japan is one of countries that employs inclusive education in all schools at all levels of education. The empowerment of children with special needs in Japan is comprehensively carried out through the formation of a Scrum team that involves medical teams (physician), government, schools (teachers), universities (lecturers), and parent. The Scrum team works together continuously to assist and provide recommendations at every level of education followed by the selection of appropriate employment opportunities for children with special needs. The independent character of children with special needs is the key for them to free themselves as a burden on their family and society. Government, family, and community supports are needed to shape the independence character of children with special needs. The inclusive education system in Japan is one of the ideal models that can be adapted in Indonesia with all of its challenges, both theoretical and practical.*

**Keywords:** *children with special needs, independence, scrum, inclusive education.*

#### **PENDAHULUAN**

Tottochan adalah sebuah novel buah karya Tetsuko Kuroyanagi dari Jepang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Novel Tottochan menceritakan seorang anak yang sangat senang di sekolah barunya. Melalui novel tersebut, Tottochan menceritakan kondisi sekolah, rasa sayang dan bangga pada kepala sekolah dan gurunya, metode pengajaran yang unik, teman-temannya yang kompak, serta kehidupannya sehari-sehari. Konsep yang sangat menarik tentang pendidikan inklusif dapat kita temukan di Tomoe Gakuen, sekolah yang diceritakan dalam novel Tottochan. Sekolah

yang memiliki tujuan menggali dan menghargai potensi yang ada pada setiap individu siswa dengan berbagai kapasitasnya (*individual differences*). Melalui konsep tersebut, setiap peserta didik dapat lebih ekspresif dalam menuangkan hasrat dan idenya ketika berada dalam proses pembelajaran, sehingga terbentuk karakter mandiri serta tangguh (*survival child*) dalam menghadapi segala tantangan di masa depan.

Delapan puluh tahun silam atau tepatnya pada tahun 1937, Tottochan, sebagaimana digambarkan melalui novel yang ditulisnya sendiri, merupakan suatu fenomena seorang siswa Sekolah Dasar di Jepang yang menjalani

proses pendidikan inklusif bersama teman-temannya yang mengalami cacat fisik dan lambat belajar (*slow learner*). Tottochan melukiskan kebanggaan terhadap sekolah tempat dia belajar. Tokoh utama novel ini ingin mempertahankan eksistensi sekolahnya walaupun di mata sebagian siswa sekolah lainnya, sekolah tersebut termasuk sekolah apa adanya, alias jelek dipandang. Ruang kelas di Tomoe Gakuen menggunakan gerbong kereta tua peninggalan zaman perang. Bagi Tottochan, Tomoe Gakuen adalah sekolah hebat karena kepala sekolahnya selalu mau mengerti dan mau mendengar segala keluhan siswa-siswanya. Kepala sekolah tidak pernah menyalahkan perilaku-perilaku ‘unik’ siswa, dan cenderung mengarahkan mereka ke perilaku yang lebih baik (Kuroyanagi, 2005).

Pada penyelenggaraan pendidikan inklusif, kita mengenal istilah peserta didik berkebutuhan khusus (*students with special needs*) dan peserta didik lainnya. Istilah peserta didik berkebutuhan khusus bukan merupakan pengganti istilah peserta didik dengan disabilitas karena istilah peserta didik berkebutuhan khusus bermakna lebih luas dan positif. Istilah peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik lainnya menggambarkan keberagaman peserta didik di sekolah. Adapun kebutuhan khusus peserta didik dapat disebabkan oleh perbedaan suku, agama, gender, bahasa, keadaan sosial-ekonomi, dan keadaan fisik.

Pada tanggal 4-25 Maret 2019 penulis mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi negara Jepang dalam program *Teacher Training on Inclusive Education*. Dalam kesempatan tersebut, penulis merekam sejumlah pelajaran berharga terkait pengembangan karakter mandiri pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah inklusif pada semua jenjang pendidikan di Jepang. Karakter mandiri yang ditanamkan antara lain berupa keterampilan hidup (*life skill*) yang diterapkan secara langsung dalam setiap proses pembelajaran dalam bentuk kegiatan merawat tanaman (*plan watering*), memberi makan ikan (*fish feeding*), dan bersama-sama memanen tanaman (*harvest time*). Sekolah inklusif membekali ABK dengan *life skill* lain berupa kemampuan memproduksi makanan dan souvenir (gantungan kunci, magnet kulkas, hiasan), selain melatih juga

kemampuan sosial ABK dalam hal berinteraksi dengan orang lain, menggunakan fasilitas umum, dan melatih kemandirian ABK dalam memenuhi kebutuhan pribadi.

Banyak hal yang bisa dipelajari dari sekolah-sekolah di Jepang. Semua sekolah di Jepang diwajibkan menerapkan sistem inklusif pada seluruh jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta. Berdasarkan pengamatan penulis selama menjalani pelatihan di Jepang, guru dan kepala sekolah memiliki keinginan untuk menghargai dan mengerti terhadap segala perbedaan siswa, sehingga siswa lebih banyak diberi kesempatan untuk berekspresi dan memilih apa yang hendak dipelajarinya hari itu. Siswa dibangun jiwanya untuk peduli terhadap sesama dan perhatian pada kesulitan yang dihadapi oleh teman-temannya, terutama teman yang berkebutuhan khusus. Dan yang tidak kalah penting, sekolah menjadi tempat bagi siswa untuk menumbuhkan kecakapan hidup (*life skill*) dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun kepercayaan diri dan jati diri mereka sebagai insan yang tangguh.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat ketentuan bahwa pada setiap lembaga, termasuk sekolah dan tempat kerja, baik negeri maupun swasta, untuk dapat menerima para penyandang disabilitas. Sebelum terbit peraturan tersebut, pendidikan inklusif telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Pasal 1 pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa Pendidikan inklusif adalah “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Pendidikan inklusif diharapkan mengarah pada pendidikan integrasi, yang tidak hanya memfasilitasi siswanya untuk belajar bersama dalam hal waktu dan tempat saja, namun mengarah pada bersatunya ABK dengan anak normal pada waktu, tempat, dan materi pelajaran yang sama. Pendidikan integrasi

dapat diterapkan di tingkat PAUD dan TK. Pada jenjang SD, SMP, dan SMA umumnya lebih sulit untuk menyamakan materi pembelajaran antara anak normal dan ABK. Pendidikan integrasi merupakan bentuk penerimaan ABK untuk dididik (belajar) di ruang khusus pada waktu-waktu yang khusus di sekolah reguler sebagai bentuk pengayaan dan pendampingan khusus bagi ABK. Pada waktu-waktu tertentu, anak-anak tersebut bersosialisasi dengan anak-anak reguler yang lain (Ashman dan Elkins, 2005).

Terminologi 'karakter' berasal dari bahasa Yunani yaitu *charassein* yang berarti mengukir hingga terbentuk pola. Memiliki akhlak mulia merupakan kondisi yang tidak secara otomatis dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Akhlak yang baik didapatkan melalui proses yang panjang dalam pengasuhan dan pendidikan yang merupakan proses pengukiran (Samani & Hariyanto, 2012). Dengan demikian karakter dapat diartikan sebagai suatu bakat maupun potensi yang dimiliki manusia sebagai bawaan hidup manusia sejak lahir yang dipengaruhi juga oleh lingkungan hidupnya. Pendidikan karakter di Indonesia secara filosofis telah dirumuskan oleh bapak pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan bahwa 'pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti/karakter, pikiran (*intelectual*), dan tubuh anak, sehingga bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita'. Pengembangan pendidikan karakter dapat dimasukkan dalam: (1) kegiatan belajar mengajar, (2) kegiatan keseharian dalam bentuk budaya sekolah, (3) kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, (4) kegiatan keseharian di rumah, dan (5) kegiatan dalam masyarakat (*Grand Design Pendidikan Karakter Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*).

Menurut Aini dan Taman (2012:54), karakter mandiri adalah kebiasaan dan pola pikir untuk tidak menggantungkan diri pada orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, siswa diharapkan memiliki bekal kemandirian yang baik sehingga mampu mengurangi ketergantungannya kepada orang lain. Karakter mandiri telah menjadi salah satu aspek sikap dalam pendidikan karakter, yang

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres tersebut menjelaskan bahwa karakter mandiri merupakan sikap yang dimiliki individu untuk belajar dengan inisiatif sendiri dalam upaya menginternalisasi pengetahuan tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain. Lebih lanjut mengenai sikap kemandirian belajar, Listyani (2010) menjelaskan bahwa terdapat enam buah indikator sikap kemandirian belajar, yaitu: (1) Ketidaktergantungan terhadap orang lain, (2) Memiliki kepercayaan diri, (3) Berperilaku disiplin, (4) Memiliki rasa tanggung jawab, (5) Berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, dan (6) Melakukan kontrol diri.

Menurut Gea (2002), mandiri adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan kekuatan sendiri. Parker (2006) juga berpendapat bahwa kemandirian juga berarti adanya kepercayaan terhadap ide-idenya sendiri. Kemandirian berkenaan dengan menyelesaikan sesuatu hal sampai tuntas serta berkenaan dengan kompetensi fisik tertentu, sehingga ketika seseorang berupaya mencapai suatu sasaran maka tidak akan pernah mengalami hilangnya kekuatan atau koordinasi. Seseorang yang memiliki kemandirian tidak akan ragu-ragu dalam menetapkan tujuan, serta tidak merasa dibatasi oleh kekuatan dan kegagalan (Parker, 2006).

Para ahli lain menyebutkan bahwa kemandirian merupakan salah satu jiwa wiraswasta yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pemahaman dan konsep hidup, yang mengarah pada kemampuan, kemauan, keuletan, ketekunan dalam menekuni bidang yang digeluti. Seorang wiraswastawan yang berhasil dipastikan memiliki jiwa mandiri (makarya). Pada dunia ekonomi, jiwa mandiri (kemandirian) dikenalkan oleh Cantillon sejak tahun 1755 yang dikenal dengan istilah *entrepreneur*, dan dikembangkan lagi setengah abad kemudian oleh Schumpeter tahun 1911 dan oleh Sombart tahun 1929, sehingga pada pertengahan abad tersebut menjadi titik awal cikal bakal perkembangan *entrepreneur* di dunia ekonomi modern (Winardi, 2003). Pembangunan masyarakat mandiri dikenal sejak PBB memberikan batasan definisi 'pembangunan masyarakat' (*community development*) pada tahun 1956.

Pada definisi tersebut disebutkan bahwa: *...the participation of the people themselves in efforts to improve their level of living with as much reliance as possible on their own initiative, and the provision of technical and other services in ways which encourage initiative, self-help and mutual help and make these more effective* (UN, 1956).

Sejalan dengan konsep pendidikan, *core value* pendidikan nasional adalah *independency* (kemandirian). Kemandirian dalam hal ini diartikan sebagai bentuk karakteristik individu yang mampu membuat keputusan sendiri setelah secara masak, konsekuen, dan mampu mensistemkan dan mensinergikan lingkungannya dengan baik. Secara tegas DePorter (1999) menyebutkan, bahwa *independency* tampil dalam proses pendidikan sebagai sebuah proses *empowering* atau pemberdayaan. Artinya dengan berbagai pembekalan isi dan wawasan, ditumbuhkan kreativitas individu dan satuan sosial, dan secara jeli dan cerdas mampu mensistemkan sekaligus mensinergikan lingkungannya untuk menggapai kemandirian (DePorter, 1999).

Strategi Scrum adalah sebuah kerangka kerja di mana orang-orang dengan berbagai elemen dapat menyelesaikan permasalahan kompleks secara bertahap, yang akan menghasilkan produk dengan nilai setinggi mungkin secara kreatif dan produktif (Sutherland dan Schwaber, 2013). Kerangka kerja Scrum terdiri dari Tim Scrum, serta peran-peran mereka di dalamnya; acara-acara; artefak-artefak; dan aturan-aturan. Setiap komponen di dalam kerangka kerja Scrum memiliki maksud tertentu dan peran penting demi keberhasilan penerapan strategi Scrum. Strategi Scrum dalam menangani ABK diimplementasikan sebagai bentuk kerjasama yang melibatkan berbagai pihak untuk memberikan penanganan ABK hingga mereka memiliki masa depan yang cerah. Langkah-langkah yang dilakukan pada implementasi strategi scrum pada pemberdayaan ABK di Jepang sebagai berikut: diagnosa tim medis, penanganan oleh pemerintah, pembentukan tim scrum untuk setiap ABK, rapat pertukaran informasi, konsultasi individu, konsultasi sekolah, dan pemberian rekomendasi karir setiap ABK.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Pendidikan Inklusif di Jepang

Strategi pendidikan inklusif diawali pada tahun 1970 di Inggris dengan menerima ABK di tempat yang sama untuk membaur dengan anak biasa lainnya (integrasi). Kemudian pada tahun 1990, pendidikan inklusif mulai dikenal dan menyebar ke seluruh dunia. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan yang secara formal kemudian ditegaskan dalam ‘Pernyataan Salamanca’ pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan bulan Juni 1994. ‘Pernyataan Salamanca’ menyebutkan bahwa prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah: selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Jepang dan Indonesia termasuk bagian dari 92 negara yang menandatangani ‘Pernyataan Salamanca’ dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tersebut. Beberapa proyek pendidikan inklusif di wilayah Asia dan Pasifik didanai oleh *Japanese Funds-in-Trust* (JFIT), yang diprakarsai pada tahun 2002 oleh UNESCO.

Sistem pendidikan inklusif di Jepang dikembangkan dengan baik dan profesional mulai tahun 2006. Regulasi tentang pendidikan inklusif di Jepang terdapat pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 yang direvisi pada tahun 2013, yang memasukkan pendidikan bagi ABK di sekolah-sekolah reguler. Sebelum ada aturan tersebut, ABK hanya dianjurkan untuk bersekolah di SLB. Pada Undang-Undang tersebut, disampaikan masalah penyeteraan hak bagi penyandang disabilitas yang berjumlah 4% dari total penduduk Jepang. Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan kehidupan sehari-hari seperti kesempatan menonton konser, sepakbola, dan sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut maka selanjutnya pemerintah Jepang menyediakan fasilitas umum yang ramah bagi ABK. Terdapat 5 pilar pendidikan inklusif di Jepang yaitu menciptakan masyarakat yang simbiosis, konsultasi pendidikan dan karier, penanganan maksimal, tempat belajar yang bervariasi, dan meningkatkan keahlian para guru. Di Italia, sistem pendidikan inklusif menempatkan siswa ABK secara bercampur di kelas umum.

Hal ini berbeda dengan Amerika, Inggris, dan Jepang yang memisahkan ABK dalam kelas khusus pada sekolah umum/regular dengan menggunakan sistem kelas sebagai berikut; (1) Kelas bimbingan khusus: ABK yang masuk kelas reguler namun pada mapel tertentu disendirikan; (2) Kelas khusus: ABK yang mengalami gangguan sedikit lebih berat kemudian disendirikan ke dalam kelas yang berbeda dengan regular; (3) SLB: sekolah yang mendidik ABK dengan gangguan yang berat.

Ada tiga hal penting yang dapat kita pelajari dari penerapan pendidikan inklusif di Jepang. **Pertama**, pola pikir pendidikan inklusif. Pada tahun 2006, regulasi tentang hak-hak orang dengan disabilitas dibentuk di Jepang. Dalam regulasi tersebut tertulis bahwa orang dengan disabilitas harus memperoleh pendidikan yang sama dengan orang lain, sesuai dengan penerapan wajib belajar hingga tingkat SMP. Pada tahun 2012, dilaksanakan musyawarah kementerian pendidikan Jepang untuk memberikan rekomendasi pada anggota dewan dalam membuat sistem pendidikan baru di Jepang. Sistem pendidikan baru tersebut selanjutnya menerapkan 3 macam layanan di sekolah berupa kelas khusus dan kelas bimbingan khusus pada sekolah inklusif, serta pendidikan luar biasa di SLB. Pada tahun 2016, muncul aturan baru tentang pendidikan untuk anak yang mengalami disabilitas di Jepang. Pendidikan inklusif dibagi menjadi dua pandangan: yang pertama berupa pembelajaran bersama antara anak normal dan ABK, yang kedua berupa pendidikan pribadi sesuai kebutuhan. Sejak saat itu, terdapat peningkatan jumlah ABK yang menjalani pendidikan di sekolah inklusif setiap tahunnya. Hal tersebut kemudian diiringi oleh peningkatan jumlah dan kemampuan guru inklusif.

**Kedua**, terdapat tiga upaya yang kerap ditemui pada pendidikan inklusif di Jepang, antara lain:

1. Menciptakan kelas yang hangat agar siswa merasa aman, nyaman, dan senang bersekolah. Sekolah tidak memberikan beban kepada anak. Siswa SD kelas 1 dan 2 mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan karakter dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kelas 3 dan 4, siswa mulai dikenalkan dengan ilmu kemasyarakatan (sosiologi) dan lingkungan

(geografi), selanjutnya pada kelas 5 dan 6 siswa mulai mengenal sains. Tempat duduk di kelas inklusi ditentukan oleh guru. Anak berkebutuhan khusus ditempatkan pada bangku depan dan jauh dari jendela agar konsentrasi mereka tidak terganggu. Guru semaksimal mungkin sering melakukan kontak mata dengan siswa ABK di kelasnya. Sistem piket di kelas dilaksanakan menggunakan kontrol kartu. Dalam kartu tertulis tugas-tugas yang harus dilakukan, seperti memimpin permulaan makan, membersihkan kelas, menyiapkan peralatan di kelas, dan lain-lain.

2. Menciptakan pembelajaran yang mudah dipahami dan menyenangkan. Guru di sekolah dasar menyampaikan pengetahuan melalui kegiatan bermain. Selain itu, guru mampu mengolah potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik dengan menyediakan media pembelajaran yang mengolah ketrampilan dan kreatifitas.
3. Menyediakan bimbingan atau dukungan yang dibutuhkan oleh ABK, menanamkan jiwa mandiri, kerap memuji atau memberikan kalimat penyanjung kepada siswa ABK. Sanjungan dan penghargaan kepada siswa tingkat sekolah dasar dapat berupa pemberian stiker. Selain banyak memberikan penghargaan/apresiasi dan dukungan kepada siswa, guru juga memberikan hukuman yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

**Ketiga**, sistem pelatihan dan kerjasama pada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif disusun dengan sistem bimbingan dengan model guru pengampu sebagai *key person*. Koordinasi di sekolah inklusif dilakukan antara guru, koordinator inklusif, PIC ruang sumber, dan kepala sekolah dalam menentukan jenis pelayanan berdasarkan *self assessment* yang dipergunakan untuk menyusun jenis pelatihan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Koordinasi tersebut dapat berupa rapat dewan guru, rapat komite internal, dan rapat kasus yang melibatkan pihak luar secara terencana. Pelaksanaan pelatihan dan seminar untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga melibatkan perguruan tinggi, *education center*, dan SLB.

### Strategi Scrum untuk Membangun Karakter Mandiri ABK

Pemberdayaan anak berkebutuhan khusus di Jepang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, propinsi, dan pemerintah daerah sekitar. Tanggungjawab tersebut meliputi jaminan karier, jaminan hak asasi manusia, kemandirian, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Guna menjalankan tanggungjawab tersebut, pemerintah menanamkan karakter mandiri pada ABK melalui strategi scrum. Manajemen scrum pada pemberdayaan ABK di Jepang melibatkan beberapa pihak, antara lain pemerintah daerah setempat, orangtua, dokter, rumah sakit, konselor, guru dari pendidikan terendah sampai pendidikan tertinggi yang ditempuh seorang ABK.

Langkah **pertama** dalam strategi scrum adalah penanganan secara dini. Ketika orangtua mulai menyadari adanya gangguan perkembangan pada anaknya, layanan pemeriksaan medis dan diagnosa terhadap gangguan perkembangan anak mulai dilakukan pada usia anak 2 tahun. Diagnosa pertama kali dilakukan di rumah sakit melalui *medical check-up* untuk mengetahui jenis gangguan, kemudian menentukan jenis obat dan *treatment* (terapi) yang diperlukan oleh anak, dilanjutkan dengan layanan kelas bimbingan anak dan orangtua, serta dukungan kemandirian dalam bermasyarakat.

Dukungan dan kelapangan hati keluarga sangat diperlukan sejak mereka menerima hasil *medical check-up*. Sekolah TK dan SD di Jepang tidak diperbolehkan menolak ABK. Penolakan sekolah terhadap ABK pada era sebelum penerapan pendidikan inklusi umumnya dikaitkan dengan kondisi ABK yang kerap mengalami kesulitan berkomunikasi di sekolah. Kondisi tersebut menjadi hal yang memalukan dan membuat sedih keluarga dalam menerima anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga keluarga mengalami kesulitan dan *stress* pada kehidupan sehari-hari. Orangtua merasa sulit dalam bekerja, kesulitan makan diluar, kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak ada harapan terhadap masa depan anak yang mengalami kebutuhan khusus.

Ketika ABK menempuh pendidikan di sekolah dasar di Jepang, guru yang tergabung dalam tim scrum akan membimbing dan merencanakan kelanjutan pendidikan anak

tersebut pada tingkat SMP. Di tingkat SMP juga demikian, guru-guru menggunakan data rekam jejak untuk mengarahkan kelanjutan studi di tingkat SMA. Saat duduk di bangku kelas 2 SMA, siswa ABK mulai diproyeksikan masa depannya: mereka perlu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau memulai karier dalam dunia kerja. Strategi tersebut merupakan langkah **kedua** dalam strategi scrum, yaitu membuat program pendidikan dalam rangka penanganan disabilitas di Jepang. Implementasi strategi scrum sebagai program pendidikan inklusif tersebut antara lain; 1) Penelitian di bidang pendidikan inklusif yang ditujukan untuk mendapatkan pembaharuan strategi dan metode mengajar; 2) Proyek pelatihan pemahaman yang benar tentang penyandang disabilitas; 3) Diklat bagi pengajar yang memiliki pengetahuan praktik dan ahli di bidang gangguan perkembangan; 4) Penempatan *school counsellor* pada masing-masing sekolah yang selalu hadir setiap seminggu sekali. Secara struktural, *school counsellor* bekerja di bawah dinas pendidikan dan digaji oleh pemerintah kota. Tugas *school counsellor* di sekolah inklusif antarlain memberikan layanan konsultasi bagi siswa ABK, guru dan orangtua ABK, melakukan rapat internal di sekolah, rekonsiliasi dan pelatihan untuk murid dan guru, penanganan dan diagnosa secara psikologis, melakukan manajemen stress bagi guru dan murid, serta melakukan penanganan darurat apabila terdapat kasus kecelakaan dan bencana. Latar belakang pendidikan *school counsellor* biasanya psikologi klinis, namun beberapa orang diantara mereka yang memiliki latar belakang pendidikan lain.

Langkah **ketiga** dalam strategi scrum adalah membuat program dan dukungan bagi penyandang disabilitas, diantaranya; 1) *Social skill training*; 2) *Parenting training*; 3) Pelatihan *assessment tool*; 4) Pengembangan *parent mentor*; 5) Menempatkan manajer tim scrum di instansi regional yang bertugas melakukan penanganan kasus yang sulit, berkoordinasi dengan instansi *medical treatment* serta mendukung pihak pemerintah kota dan perusahaan dalam menyediakan sistem dukungan bagi anak yang mengalami gangguan perkembangan.

Salah satu teknik yang digunakan untuk mengelola ABK adalah *Positive Behavior Support* (PBS) melalui program *parent*

*training*, yaitu pelatihan untuk orang tua agar memiliki pemahaman pada fase pengobatan, dengan selalu memberikan semangat dan sanjungan yang positif kepada ABK. Selain ditujukan bagi orangtua ABK, pelatihan juga diberikan kepada guru yang menangani ABK. (Bradley dalam Hallahan dkk., 2009)

Gangguan perkembangan pada anak dapat dideteksi dengan analisis ABA (*Applied Behavior Analysis*). Bentuk teknik ABA antarlain analisis perilaku dengan menggunakan *ABC Model*. *ABC model* merupakan salah satu teori yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap perilaku spesifik yang kerap muncul, termasuk perilaku anak autis yang kurang dipahami oleh orang lain. *ABC model* merupakan akronim dari *Antecedent*: Kejadian sebelum perilaku muncul; *Behavior*: perilaku yang dapat diamati; *Consequence*: apa yang terjadi setelah perilaku muncul. (Sukinah, 2005).

Beberapa pertanyaan yang umumnya diajukan oleh orangtua setelah mengetahui hasil *medical check-up* pada ABK antara lain: 1) Apakah ada gangguan perkembangan pada anak? 2) Mengapa bisa terjadi gangguan perkembangan pada anak? 3) Apakah gangguan perkembangan tersebut bisa sembuh? dan 4) Bagaimana cara mengatasinya? Dalam mengatasi permasalahan terkait ABK, pemerintah Jepang mencanangkan Program Pengasuhan Anak (*parenting program*) yang telah diterapkan di beberapa kota. Program ini ada yang berbayar dan ada yang difasilitasi oleh pemerintah. Program tersebut bertujuan untuk meluruskan sudut pandang keluarga yang memiliki ABK, agar keluarga menjadi tempat untuk mendidik anak-anak dan tempat tumbuh kembang yang baik bagi anak berkebutuhan khusus.

Melalui Program Pengasuhan Anak di Jepang, dilakukan komunikasi dan pencarian informasi untuk penanganan ABK. Selanjutnya dibuatlah program penanganan sebagai berikut; 1) Tukar pengalaman antar orangtua yang memiliki ABK; 2) Program *parenting*; 3) *Social special training*; 4) Membuat jaringan komunitas orangtua ABK; 5) Tindak lanjut secara emosional; 6) Menyarankan konsultasi dahulu ke lembaga profesional sebelum memasukkan ke SLB. Adapun teknik yang diterapkan dalam menyampaikan informasi tentang ABK antarlain: 1) Menjadi pendengar yang baik, 2)

Menghindari kata-kata yang bersifat memerintah, 3) Dalam memberikan saran memakai sudut pandang saya (konselor), misalnya dengan menggunakan kalimat “Apabila saya yang mengalami hal ini, maka ...”.

Dalam menumbuhkan karakter mandiri, program pengasuhan anak mengikutsertakan ABK dan anak biasa sebagai bagian dari masyarakat. Masyarakat normal merupakan masyarakat yang bahu membahu dan hidup rukun tanpa membeda-bedakan. Perencanaan pengasuhan inklusif dapat dilakukan dengan strategi berikut: 1) Modifikasi pembelajaran yang dapat mengakomodasi ABK; 2) Koordinasi antara pengajar dengan para ahli; 3) Pendekatan dan penanganan personal; 4) Menciptakan kesempatan kepada ABK untuk saling berkomunikasi dan menanamkan kesadaran kepada ABK untuk berteman; 5) Mengontrol dan menciptakan suasana kelas, untuk kelas yang memiliki perbedaan usia harus meminimalisir terjadinya gap; 6) Menyediakan model pengasuhan yang bervariasi, seperti kegiatan kelompok, kegiatan beda usia, dan kegiatan dengan memanfaatkan alam.

Berikut beberapa contoh penerapan pendidikan inklusi tingkat sekolah dasar di Jepang:

- 1) Haruka seorang anak berusia 6 tahun yang mengalami kelumpuhan otak. Dia duduk atau berbaring di dekat guru untuk menyaksikan kegiatan belajar *outdoor* teman-temannya. Ketika dilakukan kegiatan *game*, Haruka dapat dilibatkan dengan cara teman-teman harus menyentuh Haruka sebagai bagian dari permainan atau berlari-lari kecil mengelilingi Haruka. Meskipun Haruka tidak dapat melakukan aktivitas fisik, tetapi Haruka merasa gembira karena memiliki teman-teman yang baik.
- 2) Yukari seorang anak usia 8 tahun yang sering tantrum. Dia tidak paham peraturan dan urutan. Orang lain mungkin berpikir bahwa Yukari seorang anak yang egois dan pelanggar aturan. Hal yang sebaiknya dilakukan apabila ada kasus seperti ini adalah menambah keikutsertaan Yukari dalam kegiatan kelompok, kemudian diperlukan perjanjian antara guru dengan murid, misal sebelum berlari atau mengambil bola harus memberi isyarat atau izin kepada guru.

- 3) Shinggo seorang anak yang suka mengganggu anak lain ketika bermain atau belajar. Anak seperti Shinggo tidak bisa mengatakan “aku ikut main ya?” ketika ingin ikut bermain dengan temannya, yang akhirnya hanya bisa mengganggu. Pada penanganan kasus seperti ini, guru harus bisa menjadi mediator yang baik seperti mengatakan “Shinggo juga terampil bermain seperti kalian”. Kalimat tersebut dapat memotivasi Shinggo untuk tampil bermain dengan temannya.
- 4) Maki seorang anak 7 tahun yang suka mondar-mandir saat jam makan. Dia kesulitan berkomunikasi dan tidak betah untuk tenang. Diperlukan tempat yang aman dan nyaman untuk penanganan bagi Maki, oleh karena itu untuk sementara waktu Maki perlu disendirikan agar perasaannya menjadi tenang.
- 5) Atom seorang anak usia 9 tahun yang sangat aktif, tetapi senang memukul, menarik, dan memeluk temannya dari belakang, suka berlari berkeliling, keluar dari kelas, dan tidak ingin ikut kegiatan yang tidak diminati. Dia sangat pandai dalam merapikan cerita bergambar dan mainan sesuai jenisnya. Penanganan teradap kondisi siswa seperti Atom memerlukan sebuah tempat dan waktu yang dapat membuat anak nyaman, kemudian mengajak anak tersebut membuat perjanjian dengan senang hati mengenai peraturan dalam belajar, antara lain dengan membuat wayang kartun anak sedang duduk yang berisi perintah untuk duduk yang rapi. Terakhir guru harus selalu memuji hal-hal yang dia kuasai.

#### Lapangan kerja bagi ABK

Soja merupakan salah satu kota di Prefektur Okayama bagian selatan. Karena letaknya di tengah kota, daerah ini cukup aman terhadap bencana tsunami. Daerah ini memiliki program pendampingan dan penyediaan lapangan kerja bagi 1000 orang berkebutuhan khusus sejak tahun 2011, atau sebagai kota pionir pertama di Jepang yang kemudian dicontoh oleh beberapa kota lain sejak tahun 2015. Sejak lulus SLB, ABK sulit mendapatkan pekerjaan, oleh karena itu Pemerintah Soja membuat program ini untuk membimbing mereka memiliki keahlian dalam bekerja. Pada tahun 2012-2017, terdapat *progress* perkembangan diterimanya

ABK di pekerjaan sektor umum (perusahaan) maupun pelayanan sosial di kota Soja.

Berdasarkan pemaparan program penyediaan lapangan kerja bagi ABK yang disampaikan oleh staf Dinas Sosial dan Kesejahteraan Kota Soja, Okayama, Jepang (Maret, 2019), keterpurukan ekonomi di Amerika menyebabkan banyak perusahaan di Jepang mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut berdampak pada pengurangan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang memiliki kebutuhan khusus. Secara umum jumlah penyandang disabilitas sebanyak 4% dari total keseluruhan penduduk Jepang. Oleh karena itu perlu ada pendampingan khusus bagi tenaga kerja berkebutuhan khusus, utamanya di Kota Soja. Pemberdayaan 1000 orang tenaga kerja dengan kebutuhan khusus dimulai pada tahun 2011 dengan target waktu 5 tahun, namun target tersebut tidak tercapai dan baru dapat tercapai pemenuhan 1000 pekerja pada tahun 2017.

Saat ini target 1000 orang pekerja disabilitas sudah terpenuhi, maka selanjutnya pemerintah kota Soja memberlakukan program lanjutan dengan target 1500 tenaga kerja disabilitas. Sejak dimulai program kelanjutan pada tahun 2017, sampai saat ini baru tercapai 1013 tenaga kerja, atau hanya menambah 13 penyandang disabilitas. Spesifikasi jenis lapangan kerja bagi penyandang disabilitas adalah pekerjaan ringan, yang terbagi menjadi pekerjaan jenis A (dengan kontrak kerja, di pabrik bekal makanan, bidang pertanian packaging/ pengepakan produk pertanian dan buah, *manufacturing* / onderdil kendaraan, penjualan roti, minimarket, jasa *delivery*, pakaian, mebel) dan pekerjaan jenis B (tanpa kontrak kerja, di pabrik sarung tangan, makanan ‘nato’ dari kedelai, pom bensin, *cleaning service*, perusahaan kerajinan tangan, penggilingan kopi). Sistem distribusi pekerja disabilitas di kota Soja dilakukan secara kerjasama dengan “*Hallowork*” (badan penyalur tenaga kerja).

Program 1500 lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di kota Soja diawali dengan sosialisasi di sekolah oleh tim *scrum*. Program tersebut terintegrasi dengan pendidikan inklusi, dimana setiap sekolah telah melakukan *medical check-up* bagi ABK, yang dilanjutkan dengan pemberian keterampilan secara terintegrasi dalam buku-buku pelajaran. Dalam upaya pemenuhan target 1500 lapangan kerja tersebut,



penyandang disabilitas harus mendaftar terlebih dahulu di kantor dinas. Dinas akan melaksanakan pembelajaran tentang kehidupan sehari-hari dan keterampilan sesuai minat masing-masing. Perekrutan selalu dikabarkan melalui berita televisi dan media masa. Proses *interview* dilakukan untuk menyesuaikan keterampilan dengan minat pekerja, dimana para ABK memiliki catatan khusus untuk menentukan jenis pekerjaan mereka.

Di kota Soja, kita bisa menemukan *café* dan *convension store* yang dikelola oleh pekerja yang kebutuhan khusus. Umumnya pendapatan pekerja berkebutuhan khusus semakin lama semakin naik, sehingga gaji mereka dapat disamakan dengan pekerja lain. Selain mempekerjakan para penyandang disabilitas usia produktif (18-65 tahun), lapangan kerja di Soja juga menerima pekerja yang melampaui usia produktif (>65 tahun), serta menampung pekerja ABK di bawah usia kerja (<18 tahun). Tidak ada syarat khusus bagi pekerja ABK dari segi Pendidikan formal. Bagi pekerja usia lanjut tersedia juga fasilitas panti jompo. Bagi penyandang kebutuhan khusus yang kompleks, pembiayaan hidup ditanggung oleh negara dengan sumber dana pajak pensiun.

Ketika ada konflik antara pekerja ABK dengan pekerja lain maka dinas akan turun tangan dengan melakukan studi kasus dan menjalin komunikasi, karena masalah yang umum terjadi biasanya masalah komunikasi. Tujuan penancangan program 1500 lapangan kerja bagi penyandang disabilitas adalah untuk mempersiapkan kehidupan yang mandiri bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Proses pendampingan bagi pekerja dengan kebutuhan khusus dan penyandang disabilitas berupa bimbingan dari perusahaan yang di pandu oleh pihak pelaksana program dengan menggunakan data-data yang dimiliki, yang secara periodik dilanjutkan dengan pemantauan dan kunjungan ke tempat mereka berkerja. Sama halnya dengan pekerja lain, mereka juga menjalani orientasi kerja selama satu pekan sebelum bekerja. Total biaya program ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah kota Soja. Adapun penyandang disabilitas dan pekerja dengan kebutuhan khusus yang mendaftar program tersebut boleh berasal dari luar kota Soja. Selain menjadi pekerja, ABK yang berminat menjadi wirausahawan akan diakomodasi oleh

pemerintah kota Soja dengan pembimbingan, pengenalan regulasi, cara berwirausaha, studi banding, dan pemberian modal dari pemerintah dengan syarat mengajukan proposal yang baik.

## SIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan di Jepang mewajibkan seluruh anak usia 0 – 15 tahun untuk sekolah (wajib belajar hingga usia SMP). Setiap sekolah wajib menerima semua anak, tanpa kecuali. Anak berkebutuhan khusus diperbolehkan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan atas rekomendasi dari dinas pendidikan. Sebelum masuk sekolah, dilakukan *medical check up* untuk para ABK agar dapat memastikan jenis bantuan yang dibutuhkan supaya mereka bisa belajar secara maksimal sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Memasuki usia SMA, anak diberi pilihan untuk memilih dan menentukan masa depannya.

Perencanaan pendidikan bagi ABK dimulai dari kesadaran orang tua yang merasakan adanya kebutuhan khusus pada anaknya untuk dilakukan *medical check up* di rumah sakit. Dengan membawa hasil *medical check up*, orang tua melapor ke pemerintah kota setempat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim scrum untuk melayani kebutuhan pendidikan hingga karier ABK tersebut. Pemerintah kota melalui tim scrum memberikan rekomendasi bagi ABK untuk menempuh pendidikan SD di sekolah reguler inklusif atau di SLB. Ketika memasuki jenjang SMP, tim scrum kembali memberikan rekomendasi sekolah yang sesuai bagi penyandang disabilitas. Pemberian rekomendasi tersebut berlanjut hingga pendidikan tingkat SMA maupun tahap penyediaan lapangan pekerjaan.

Pembimbingan ABK di kelas inklusif dilakukan oleh pembimbing khusus yang bersertifikat. Model pembimbingan dan pendampingan anak berkebutuhan khusus dilakukan secara komprehensif, melibatkan banyak pihak, dan berkelanjutan. Pendidikan inklusif di Jepang dilaksanakan di seluruh sekolah mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Belajar dari sistem pendidikan inklusif di Jepang, maka terlepas dari segala tantangan teoritis maupun praktis, penerapan sekolah inklusif di Indonesia dapat mengadopsi sistem yang sama di setiap jenjang pendidikan agar terbentuk karakter ABK yang mandiri dan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Pratista Nor dan Taman, Abdullah. (2012). "Pengaruh Kemandirian Belajar dan Lingkungan Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sewon Bantul Tahun Ajaran 2010/2011" *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. X (1), hlm. 48–65.
- Ashman, A. and Elkins, J. (eds). (2005). *Educating Children with Special Needs*. Sidney: Prentice Hall of Australia Pty Ltd.
- DePorter, N., dkk. (1999). *Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Bandung: Kaifa.
- Gea, A.A. (2002). *Relasi dengan Diri Sendiri*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. G. (2009). *Exceptional Learners, an Introduction to Special Education 11th ed*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Kuroyanagi, Tetsuko. (2005). *Totto-Chan Gadis Cilik di Jendela*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Listyani, Endang. & Hidayati, Kana. (2010) *Pengembangan Instrumen Kemandirian Belajar Mahasiswa*. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. Vol.14 No.1 hlm. 84-99. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/1977/1625>.
- Parker, Deboar K. (2006). *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Samani, Muchlas dan Hariyanto. (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukinah. (2005). *Penata Laksana Perilaku Anak Autisme Dengan Metode Applied Behavior Analysis*. *Jurnal Pendidikan Khusus*. Vol.1 No.2 November 2005 hlm.124.
- Sutherland, Jeff dan Schwaber, Ken. (2013). *Panduan Scrum*. ScrumGuides.org. Diakses pada 26 Juli 2019.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Winardi, J, Prof. Dr. SE., (2003). *Entrepreneur and Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana.